

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimmly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bowers, John, *et al.*, 2000, *Textbook on Labour Law*, Blackstone Press Limited, London.
- Djumialdji, F.X., 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, *et al.*, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hadi, Sutopo, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, *et al.*, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, Bagir, 2014, *Hukum Positif Indonesia*, FFH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- M. Hadjon, Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Oetomo, R. Goenawan, 2004. *Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia*, Grahadika Binangkit Press, Jakarta.
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts.
- Soepomo, Iman, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

_____, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV.Ramadja Karya, Bandung.

_____, 2008, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, Citra Adityabakti, Jakarta.

Tjandra, Surya, 2006, *Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan*, TURC, Jakarta.

Uwiyono, Aloysisus, *et al.*, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung.

Artikel Jurnal

Hernoko, Agus Yudha, Asas Proporsionalitas sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak komersil, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, November 2016.

Tesis

Moniri, Moh, 2012, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Laut antara Anak Buah Kapal dengan PT. Dharma Lautan Utama Cabang Banjarmasin*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Berlia, Binsar Dennis, 2016, *Peranan Syahbandar Utama Tanjung Priok Dalam Perjanjian Kerja Laut Pada Kapal Berbendera Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Jakarta Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nainggolan, Edward, 2016, *Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran Terhadap Awak Kapal Dalam Perjanjian Kerja Laut Saat Terjadi Kecelakaan Kapal*, Program Magister Ilmu Hukum Jakarta Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang *Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Pengesahan Maritime Labour Convention 2006* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369).

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481).

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention Concerning Promotional Framework For Occupational Safety and Health 1*. (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200).



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**KEWENANGAN PEMERINTAH TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DALAM PERJANJIAN
KERJA LAUT**

GHALIB ALGHANI L, Prof. Dr. Ari Hermawan, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1193).

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/3/13/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim.